

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI**  
**NOMOR 47 TAHUN 2003 SERI A NOMOR 04**

---

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI**

**NOMOR 04 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 26 TAHUN  
2002 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, belum semuanya mempedomani ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, untuk itu perlu dilakukan penyempurnaan kembali;
  - b. Bahwa penyempurnaan Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan Perubahan dengan Peraturan Daerah.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14);
17. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Mneteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dearah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

**" Pasal 58**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan Gaji yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya Gaji Pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

- (3) Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

**" Pasal 59**

- (1) Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka Peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Tunjangan Peningkatan Kinerja yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan Purna bhakti setelah berakhirnya Masa Jabatan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
3. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan BAB XI A sebagai berikut :

**BAB XI A**

**TUNJANGAN DAERAH**

**Pasal 59 A**

- (1) Dalam rangka peningkatan Aparatur Pemerintah Kota Jambi setiap Pejabat Struktural maupun Fungsional dan Staf yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil diberikan Tunjangan Daerah.
- (2) Tunjangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setiap bulan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal, 30 Oktober 2003

**WALIKOTA JAMBI**

**Dto**

**ARIFIEN MANAP**

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.

Nomor : 12 A Tahun 2003  
Tanggal : 30 Oktober 2003  
Tentang : Persetujuan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Nomor : 47 Tahun 2003  
Seri : A Nomor 04  
Tanggal : 04 Nopember 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI**

**Dto**

**Drs. H. HASAN BASRI AGUS, MM**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 430004914